



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 16 TAHUN 2020 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penataan dan optimalisasi tugas dan fungsi unit pelaksana teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perlu melakukan penyesuaian tugas, fungsi, organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2016 tentang Kriteria Tipologi Unit Pelaksana Teknis di Bidang Pelaksanaan Jalan Nasional di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 543);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2016 tentang Kriteria Tipologi Unit Pelaksana Teknis di Bidang Wilayah Sungai di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 663);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 16 TAHUN 2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf d dan huruf e Pasal 77 diubah sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

UPT di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Bina Marga, terdiri atas:

- a. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional;
 - b. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional;
 - c. Balai Bahan Jalan;
 - d. Balai Jembatan;
 - e. Balai Geoteknik, Terowongan, dan Struktur; dan
 - f. Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan.
2. Judul Bagian Kelima Bab III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima

Balai Jembatan

3. Ketentuan Pasal 113 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 113

- (1) Balai Jembatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Marga melalui Direktur Pembangunan Jembatan.
- (2) Balai Jembatan dipimpin oleh seorang Kepala.

4. Ketentuan Pasal 114 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 114

Balai Jembatan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi teknis dan pemantauan perilaku jembatan khusus dan terowongan, memberikan dukungan administrasi dan teknis kepada Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan dan memberikan layanan advis teknis melalui koordinasi dengan Direktorat Pembangunan Jembatan.

5. Ketentuan Pasal 115 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 115

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Balai Jembatan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan inspeksi jembatan khusus dan terowongan;
- b. pelaksanaan evaluasi teknis dan analisis kondisi jembatan khusus dan terowongan;
- c. pelaksanaan inventarisasi, registrasi, dan klarifikasi potensi bahaya terhadap jembatan khusus dan terowongan;
- d. pemberian dukungan administrasi dan dukungan teknis kepada Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan;
- e. pemberian layanan advis teknis untuk perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi jembatan; dan
- f. pelaksanaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, administrasi kepegawaian, pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan, penerimaan negara bukan pajak, dan barang milik negara.

6. Ketentuan Pasal 116 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 116

Susunan organisasi Balai Jembatan terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Tata Usaha; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
7. Judul Bagian Keenam Bab III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam

Balai Geoteknik, Terowongan, dan Struktur

8. Ketentuan Pasal 118 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 118

- (1) Balai Geoteknik, Terowongan, dan Struktur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Marga melalui Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan.
 - (2) Balai Geoteknik, Terowongan, dan Struktur dipimpin oleh seorang Kepala.
9. Ketentuan Pasal 119 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 119

Balai Geoteknik, Terowongan, dan Struktur mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi dan memberikan layanan teknis di bidang geoteknik, keempaan, jembatan, terowongan jalan, dan bangunan struktur lainnya untuk jalan melalui koordinasi dengan Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan.

10. Ketentuan Pasal 120 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 120

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, Balai Geoteknik, Terowongan, dan Struktur menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi di bidang geoteknik, kegempaan, jembatan, terowongan jalan, dan bangunan struktur lainnya untuk jalan termasuk pelaksanaan alih teknologinya;
- b. pelaksanaan penyiapan kesiapterapan teknologi bidang geoteknik, kegempaan, jembatan, terowongan jalan, dan bangunan struktur lainnya untuk jalan;
- c. pelaksanaan uji laboratorium, lapangan, sertifikasi, inspeksi dan kliring teknologi bidang jalan dan jembatan;
- d. pelaksanaan layanan teknis dan penyiapan penerbitan rekomendasi teknis di bidang geoteknik, kegempaan, jembatan, terowongan jalan, dan bangunan struktur lainnya untuk jalan berupa:
 1. penilaian kualitas konstruksi;
 2. pengkajian dan advis teknis untuk perencanaan teknis maupun pelaksanaan konstruksi; dan
 3. mitigasi bencana alam dan kegempaan;
- e. pengembangan sistem monitoring bidang geoteknik, kegempaan, jembatan, terowongan jalan, dan bangunan struktur lainnya untuk jalan; dan
- f. pelaksanaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, administrasi kepegawaian, pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan, penerimaan negara bukan pajak, dan barang milik negara.

11. Ketentuan Pasal 121 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 121

Susunan organisasi Balai Geoteknik, Terowongan, dan Struktur terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

12. Ketentuan angka 2 huruf d Pasal 211 diubah sehingga Pasal 211 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 211

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, di lingkungan Kementerian terdapat 19 (sembilan belas) balai besar dan 173 (seratus tujuh puluh tiga) balai yang terdiri atas:

- a. UPT di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air terdiri atas:
 1. Balai Besar Wilayah Sungai Tipe A sebanyak 11 (sebelas) balai;
 2. Balai Besar Wilayah Sungai Tipe B sebanyak 1 (satu) balai;
 3. Balai Wilayah Sungai Tipe A sebanyak 25 (dua puluh lima) balai; dan
 4. Balai Teknik sebanyak 9 (sembilan) balai.
- b. UPT di Direktorat Jenderal Bina Marga terdiri atas:
 1. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe A sebanyak 6 (enam) balai;
 2. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe B sebanyak 1 (satu) balai;
 3. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe A sebanyak 26 (dua puluh enam) balai; dan

4. Balai Teknik sebanyak 4 (empat) Balai.
 - c. UPT di Direktorat Jenderal Cipta Karya terdiri atas:
 1. Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kelas I sebanyak 27 (dua puluh tujuh) balai;
 2. Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kelas II sebanyak 7 (tujuh) balai; dan
 3. Balai Teknik sebanyak 5 (lima) Balai.
 - d. UPT di Direktorat Jenderal Perumahan terdiri atas:
 1. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kelas I sebanyak 15 (lima belas) balai; dan
 2. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kelas II sebanyak 4 (empat) balai.
 - e. UPT di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi terdiri atas:
 1. Balai Jasa Konstruksi sebanyak 7 (tujuh) balai;
 2. Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Kelas I sebanyak 26 (dua puluh enam) balai; dan
 3. Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Kelas II sebanyak 8 (delapan) balai.
 - f. UPT di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri atas:
 1. Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebanyak 9 (sembilan) balai; dan
 2. Balai Penilaian Kompetensi sebanyak 1 (satu) balai.
13. Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2020
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1144

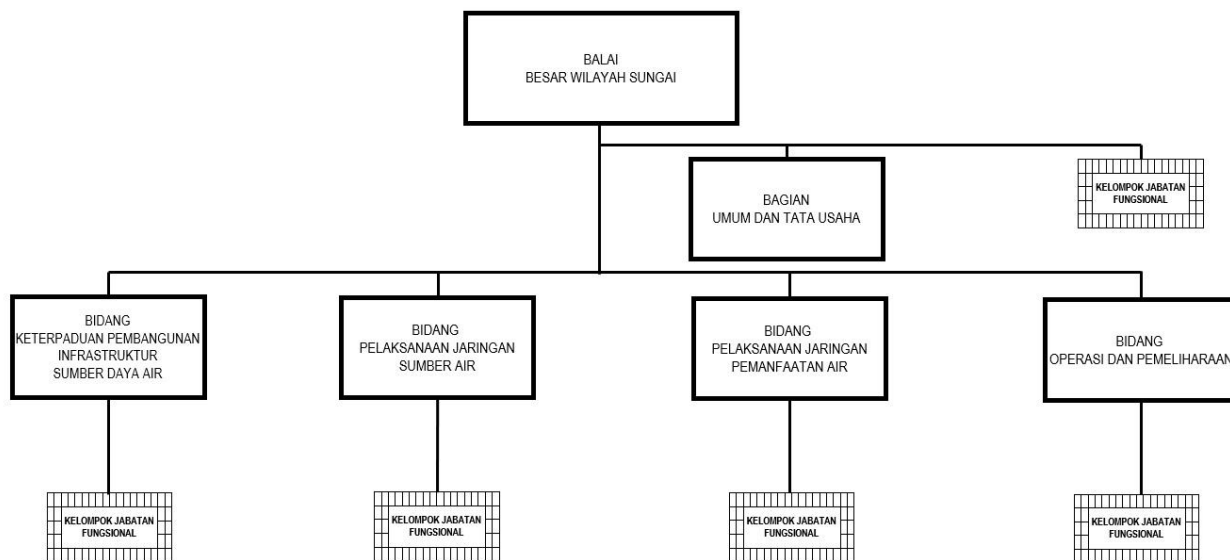


LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 16 TAHUN 2020 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

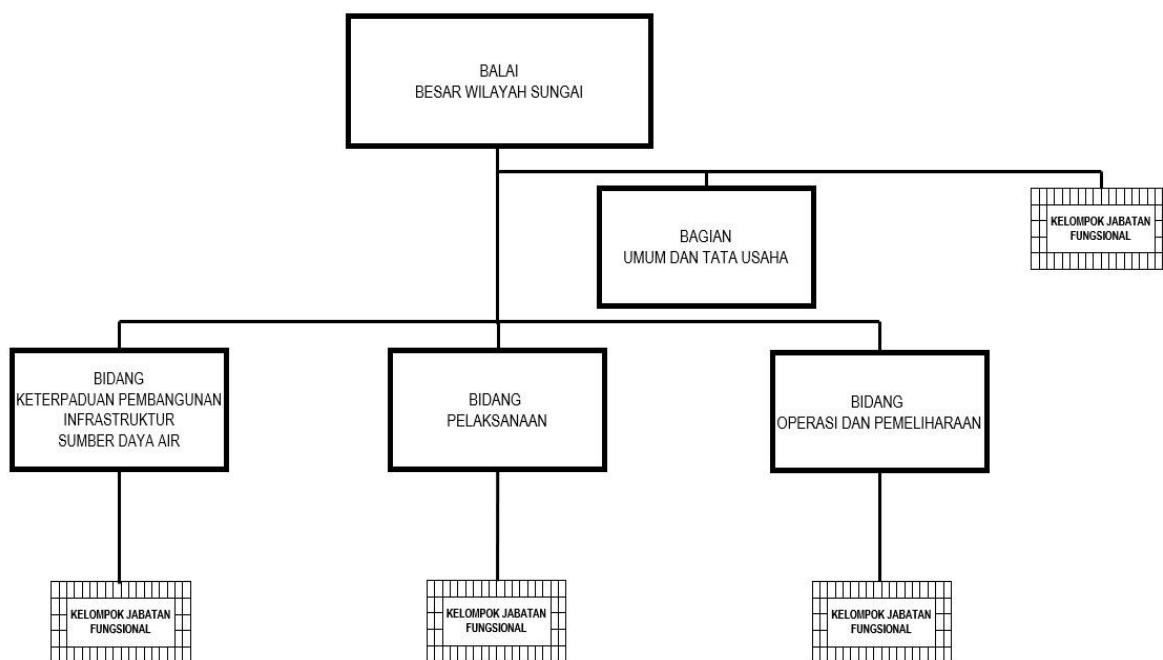
STRUKTUR ORGANISASI, NOMENKLATUR, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA
BALAI DI BAWAH KOORDINASI
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

A. Struktur Organisasi

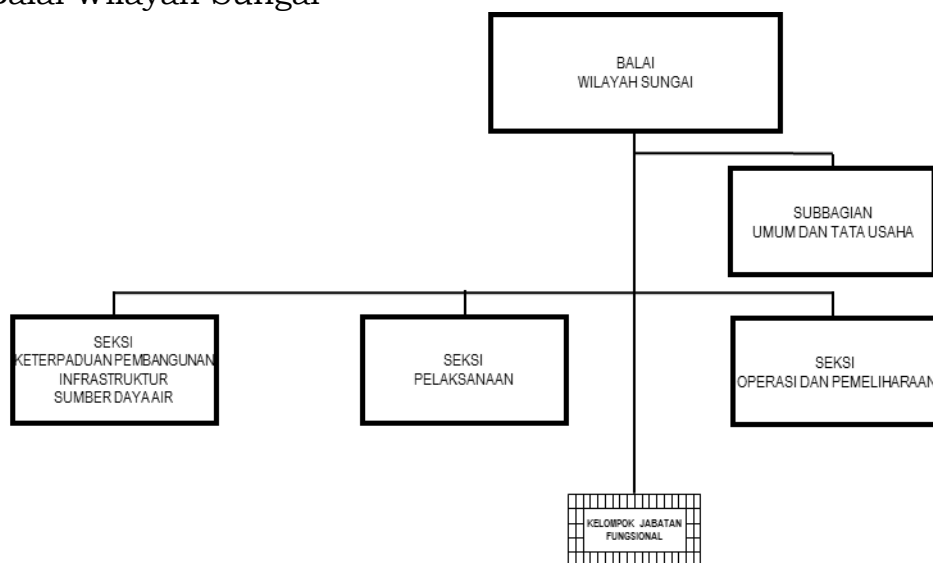
1. Balai Besar Wilayah Sungai Tipe A



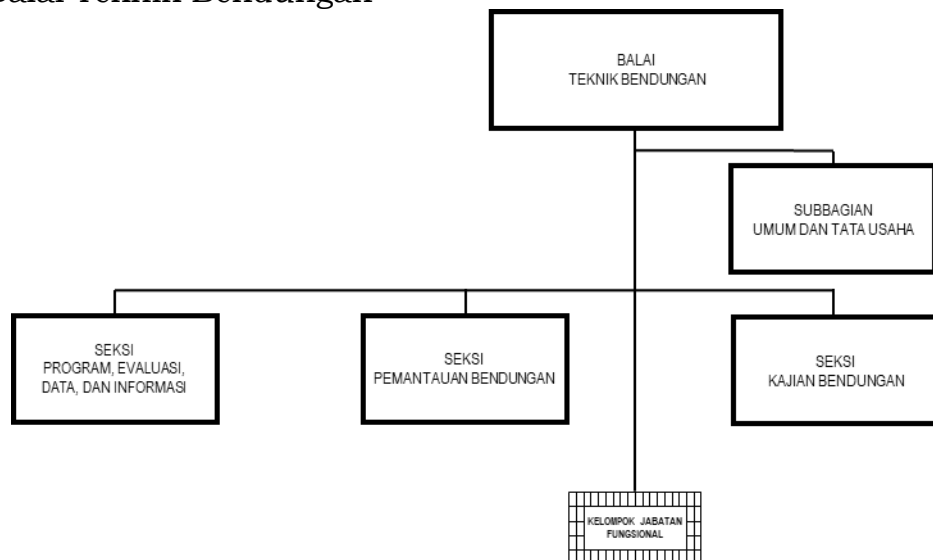
2. Balai Besar Wilayah Sungai Tipe B



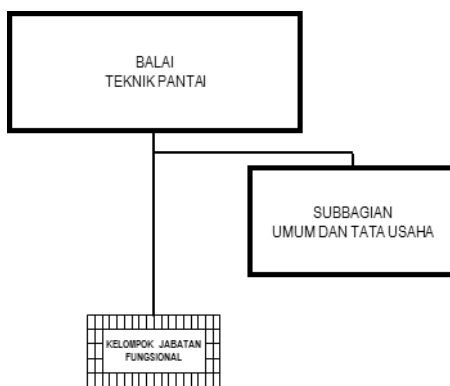
3. Balai Wilayah Sungai



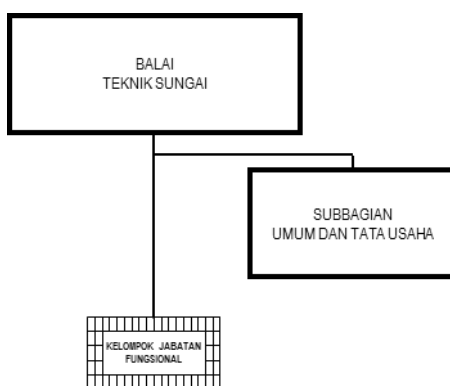
4. Balai Teknik Bendungan



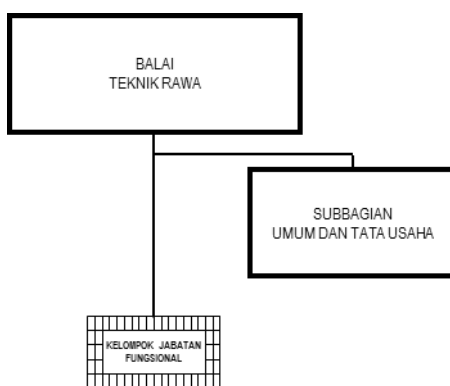
5. Balai Teknik Pantai



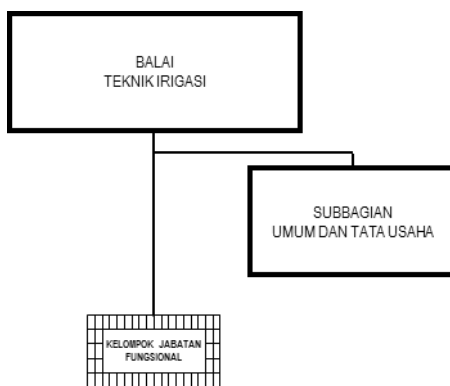
6. Balai Teknik Sungai



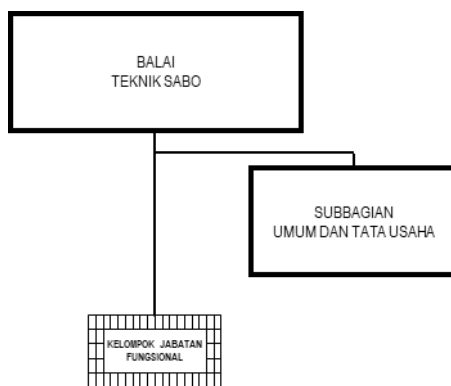
7. Balai Teknik Rawa



8. Balai Teknik Irigasi



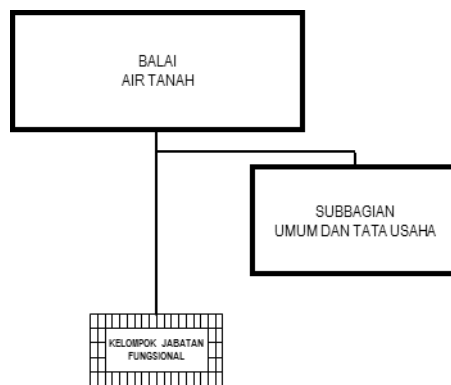
9. Balai Teknik Sabo



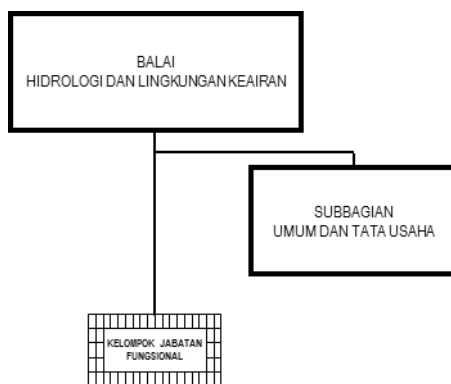
10. Balai Hidrolika dan Geoteknik Keairan



11. Balai Air Tanah



12. Balai Hidrologi Dan Lingkungan Keairan



B. Nomenklatur, Lokasi, dan/atau Wilayah Kerja

1. Balai Besar Wilayah Sungai Tipe A

NO.	NOMENKLATUR UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII Palembang	Palembang	WS Musi- Sugihan- Banyuasin - Lemau
2.	Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung	Bandar Lampung	(1) WS Mesuji – Tulang Bawang (2) WS Seputih – Sekampung
3.	Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung, Cidurian	Serang	WS Cidanau – Ciujung - Cidurian
4.	Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane	Jakarta	WS Ciliwung - Cisadane
5.	Balai Besar Wilayah Sungai Citarum	Bandung	WS Citarum
6.	Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung	Cirebon	WS Cimanuk - Cisanggarung
7.	Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana	Semarang	WS Jratunseluna
8.	Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak	Yogyakarta	(1) WS Serayu – Bogowonto (2) WS Progo – Opak – Serang
9.	Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo	Surakarta	WS Bengawan Solo
10.	Balai Besar Wilayah Sungai Brantas	Surabaya	WS Brantas

NO.	NOMENKLATUR UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA
11.	Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang	Makassar	(1) WS Pompengan – Larona (2) WS Saddang (3) WS Walanae – Cenranae (4) WS Jeneberang

2. Balai Besar Wilayah Sungai Tipe B

NO.	NOMENKLATUR UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy	Banjar	WS Citanduy

3. Balai Wilayah Sungai

NO.	NOMENKLATUR UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Balai Wilayah Sungai Sumatera I Banda Aceh	Banda Aceh	(1) WS Aceh-Meureudu (2) WS Woyla-Batee (3) WS Jambo-Aye (4) WS Alas-Singkil
2.	Balai Wilayah Sungai Sumatera II Medan	Medan	(1) WS Belawan-Ular – Padang (2) WS Toba-Asahan (3) WS Batang Natal- Batang Batahan
3.	Balai Wilayah Sungai Sumatera III Pekanbaru	Pekanbaru	(1) WS Rokan (Prov. Riau) (2) WS Siak (3) WS Kampar (Prov. Riau) (4) WS Indragiri- Akuaman (Prov. Riau)
4.	Balai Wilayah Sungai Sumatera IV Batam	Batam	WS Kepulauan Riau
5.	Balai Wilayah Sungai Bangka Belitung	Pangkal Pinang	WS Bangka

NO.	NOMENKLATUR UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA
6.	Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang	Padang	(1) WS Indragiri – Akuaman (Prov. Sumbar) (2) WS Rokan (Prov. Sumbar) (3) WS Kampar (Prov. Sumbar) (4) WS Batanghari (Prov. Sumbar)
7.	Balai Wilayah Sungai Sumatera VI Jambi	Jambi	WS Batanghari (Prov. Jambi)
8.	Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu	Bengkulu	(1) WS Teramang-Muar (2) WS Nasal-Padang- Guci
9.	Balai Wilayah Sungai Bali Penida	Denpasar	WS Bali-Penida
10.	Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I Mataram	Mataram	(1) WS Lombok (2) WS Sumbawa
11.	Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II Kupang	Kupang	(1) WS Flores (2) WS Benanain (3) WS Noelmina
12.	Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak	Pontianak	WS Kapuas
13.	Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Palangkaraya	Palangkaraya	(1) WS Jelai – Kendawangan (2) WS Mentaya – Katingan (3) WS Barito DAS Kapuas

NO.	NOMENKLATUR UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA
14.	Balai Wilayah Sungai Kalimantan III Banjarmasin	Banjarmasin	WS Barito selain DAS Kapuas
15.	Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV Samarinda	Samarinda	WS Mahakam
16.	Balai Wilayah Sungai Kalimantan V Tanjung Selor	Tanjung Selor	(1) WS Sesayap (2) WS Berau - Kelai
17.	Balai Wilayah Sungai Sulawesi I Manado	Manado	(1) WS Tondano – Sangihe-Talaud – Miangas (2) WS Dumoga-Sangkub
18.	Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Gorontalo	Gorontalo	(1) WS Limboto-Bolango-Bone (2) WS Paguyaman (3) WS Randangan
19.	Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu	Palu	(1) WS Palu-Lariang (2) WS Parigi-Poso (3) WS Kalukku-Karama
20.	Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV Kendari	Kendari	(1) WS Lasolo-Konaweha (3) WS Towari-Lasusua
21.	Balai Wilayah Sungai Maluku	Ambon	(1) WS Ambon-Seram (3) WS Kep.Yamdena-Wetar
22.	Balai Wilayah Sungai Maluku Utara	Ternate	(1) WS Halmahera Utara (2) WS Halmahera Selatan
23.	Balai Wilayah Sungai Papua	Jayapura	(2) WS Memberamo-Tami-Apauvar
24.	Balai Wilayah Sungai Papua Barat	Manokwari	(1) WS Kamundan-Sebyar (2) WS Omba
25.	Balai Wilayah Sungai	Marauke	WS Einlanden-Digul-

NO.	NOMENKLATUR UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA
	Papua Marauke		Bikuma

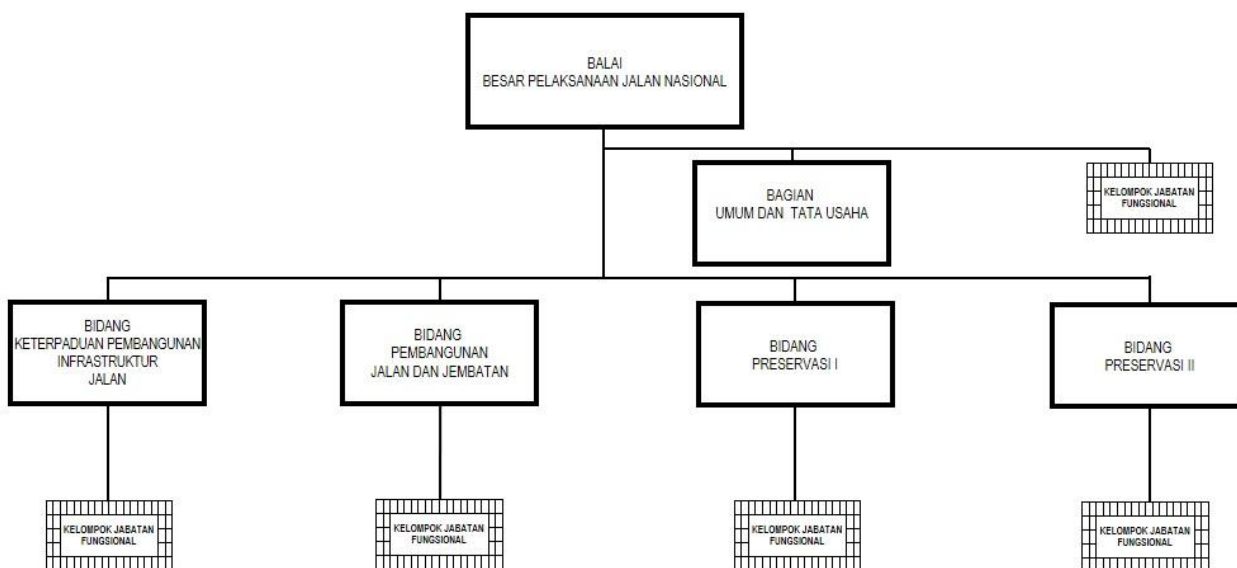
4. Balai Teknik

NO.	NOMENKLATUR UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Balai Teknik Bendungan	Jakarta	Seluruh Wilayah Indonesia
2.	Balai Teknik Pantai	Buleleng	Seluruh Wilayah Indonesia
3.	Balai Teknik Sungai	Surakarta	Seluruh Wilayah Indonesia
4.	Balai Teknik Rawa	Banjarmasin	Seluruh Wilayah Indonesia
5.	Balai Teknik Irigasi	Bekasi	Seluruh Wilayah Indonesia
6.	Balai Teknik Sabo	Yogyakarta	Seluruh Wilayah Indonesia
7.	Balai Hidrolika dan Geoteknik Keairan	Bandung	Seluruh Wilayah Indonesia
8.	Balai Air Tanah	Bandung	Seluruh Wilayah Indonesia
9.	Balai Hidrologi dan Lingkungan Keairan	Bandung	Seluruh Wilayah Indonesia

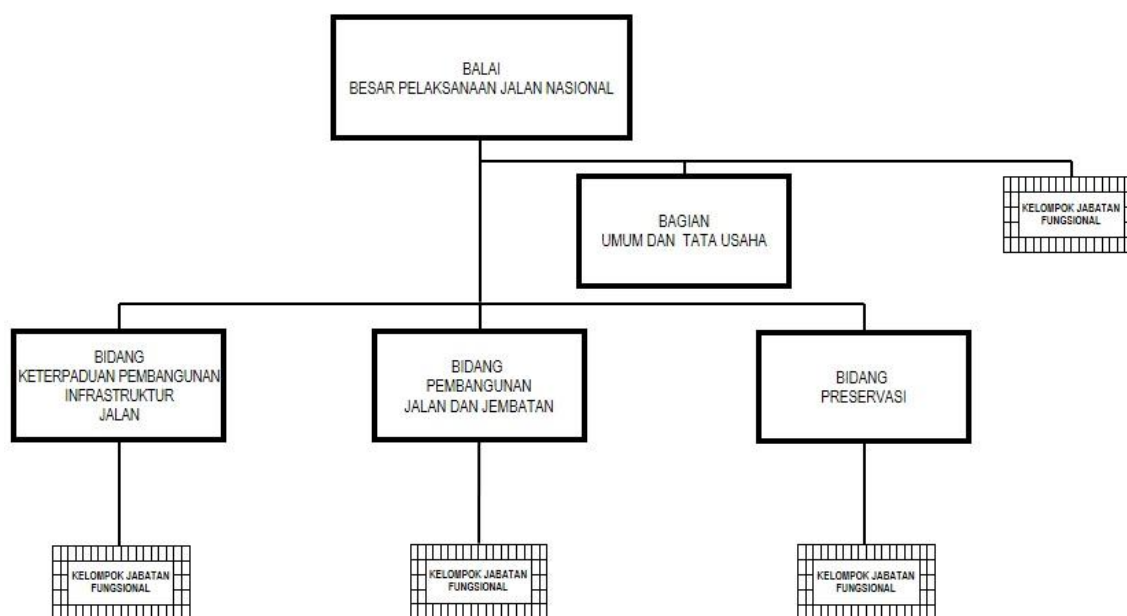
STRUKTUR ORGANISASI, NOMENKLATUR, LOKASI, DAN WILAYAH KERJABALAI
DI BAWAH KOORDINASI
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

A. Bagan Struktur Organisasi

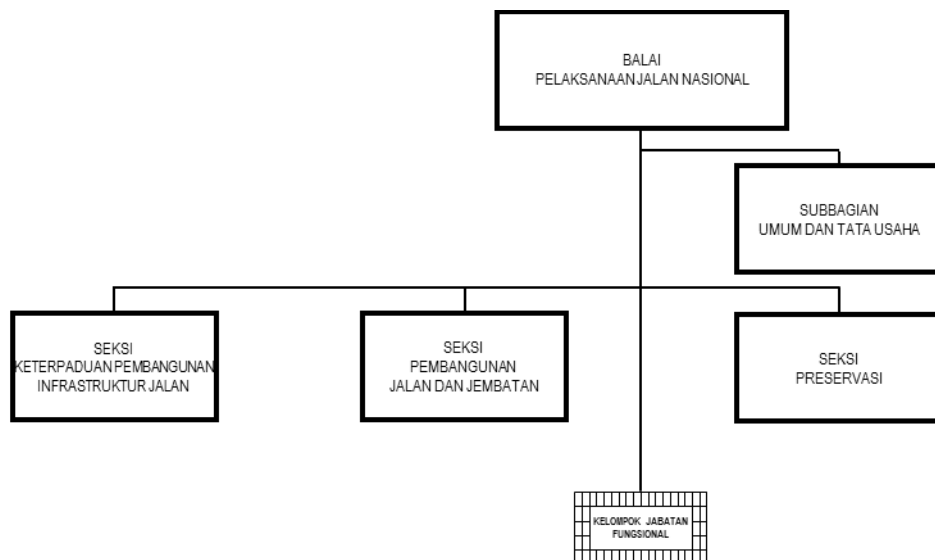
1. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe A



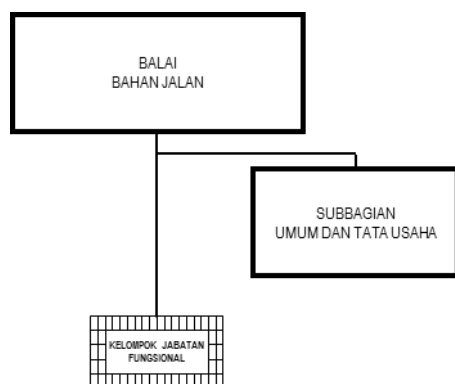
2. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe B



3. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional



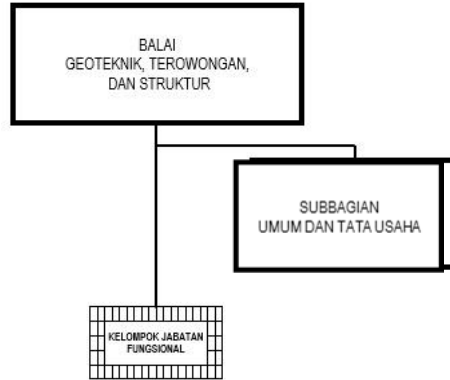
4. Balai Bahan Jalan



5. Balai Jembatan



6. Balai Geoteknik, Terowongan, dan Struktur



7. Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan



B. Nomenklatur, Lokasi, dan/atau Wilayah Kerja

1. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe A

NO	NOMENKLATUR UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara	Medan	Prov. Sumatera Utara
2.	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan	Palembang	Prov. Sumatera Selatan
3.	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta-Jawa Barat	Bandung	1. Prov. DKI Jakarta 2. Prov. Jawa Barat
4.	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah-DI Yogyakarta	Semarang	1. Prov. Jawa Tengah 2. Prov. DI. Yogyakarta
5.	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur-Bali	Surabaya	1. Prov. Jawa Timur 2. Prov. Bali
6.	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan	Makassar	Prov. Sulawesi Selatan

2. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe B

NO	NOMENKLATUR UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur	Balikpapan	Prov. Kalimantan Timur

3. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional

NO	NOMENKLATUR UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh	Banda Aceh	Prov. Aceh
2.	Balai Pelaksanaan Jalan	Pekanbaru	Prov. Riau

NO	NOMENKLATUR UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA
	Nasional Riau		
3.	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau	Batam	Prov. Kepulauan Riau
4.	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat	Padang	Prov. Sumatera Barat
5.	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jambi	Jambi	Prov. Jambi
6.	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bengkulu	Bengkulu	Prov. Bengkulu
7.	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bangka Belitung	Pangkal Pinang	Prov. Bangka Belitung
8.	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung	Bandar Lampung	Prov. Lampung
9.	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Banten	Serang	Prov. Banten
10.	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat	Mataram	Prov. Nusa Tenggara Barat
11.	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur	Kupang	Prov. Nusa Tenggara Timur
12.	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat	Pontianak	Prov. Kalimantan Barat
13.	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan	Banjarmasin	Prov. Kalimantan Selatan
14.	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Utara	Tanjung Selor	Prov. Kalimantan Utara
15.	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Tengah	Palangkaraya	Prov. Kalimantan Tengah
16.	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara	Manado	Prov. Sulawesi Utara
17.	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Gorontalo	Gorontalo	Prov. Gorontalo

NO	NOMENKLATUR UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA
18.	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah	Palu	Prov. Sulawesi tengah
19.	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tenggara	Kendari	Prov. Sulawesi Tenggara
20.	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Barat	Mamuju	Prov. Sulawesi Barat
21.	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku	Ambon	Prov. Maluku
22.	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Utara	Ternate	Prov. Maluku Utara
23.	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura	Jayapura	1. Kab. Dogiyai 2. Kab. Nabire 3. Kab. Supiori 4. Kab. Biak Numfor 5. Kab. Kepulauan Yapen 6. Kab. Waropen 7. Kab. Membramo Raya 8. Kab. Sarmi 9. Kab. Jayapura 10. Kota Jayapura 11. Kab. Keerom
24.	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Merauke	Merauke	1. Kab. Asmat 2. Kab. Mappi 3. Kab. Boven Digoel 4. Kab. Merauke
25.	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Barat	Manokwari	Prov. Papua Barat
26.	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wamena	Wamena	1. Kab. Mimika 2. Kab. Deiyai 3. Kab. Paniai 4. Kab. Intan Jaya 5. Kab. Puncak 6. Kab. Puncak Jaya 7. Kab. Tolikara 8. Kab. Lanny Jaya

NO	NOMENKLATUR UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA
			9. Kab. Nduga 10. Kab. Membramo Tengah 11. Kab. Yalimo 12. Kab. Jayawijaya 13. Kab. Yahukimo 14. Kab. Pegunungan Bintang

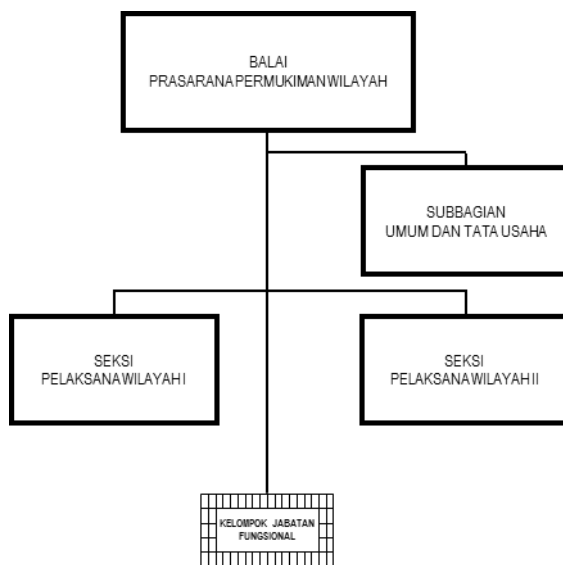
4. Balai Teknik

NO.	NOMENKLATUR UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Balai Bahan Jalan	Bandung	Seluruh Wilayah Indonesia
2.	Balai Jembatan	Bandung	Seluruh Wilayah Indonesia
4.	Balai Geoteknik, Terowongan, dan Struktur	Bandung	Seluruh Wilayah Indonesia
5.	Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan	Bandung	Seluruh Wilayah Indonesia

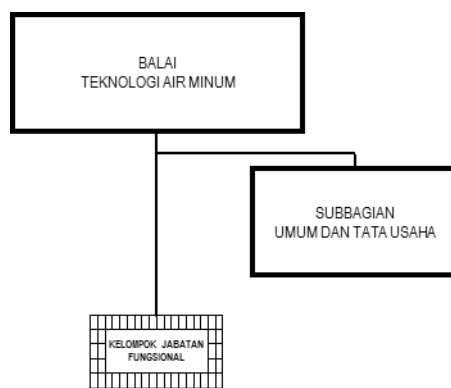
STRUKTUR ORGANISASI, NOMENKLATUR, LOKASI, DAN WILAYAH KERJABALAI
DI BAWAH KOORDINASI
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

A. Struktur Organisasi

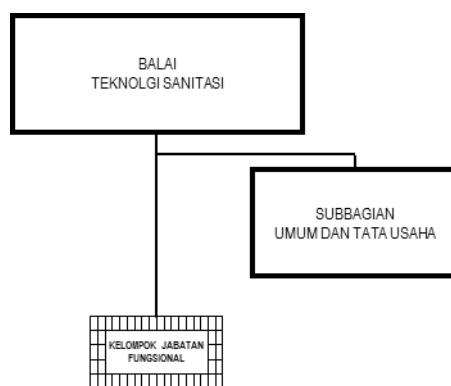
1. Balai Prasarana Permukiman Wilayah



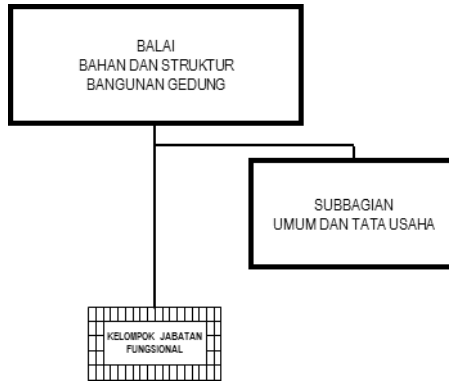
2. Balai Teknologi Air Minum



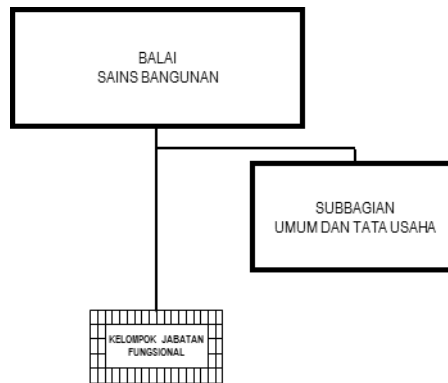
3. Balai Teknologi Sanitasi



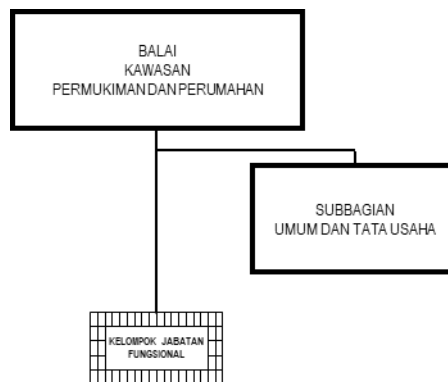
4. Balai Bahan dan Struktur Bangunan Gedung



5. Balai Sains Bangunan



6. Balai Kawasan Permukiman dan Perumahan



B. Nomenklatur, Lokasi, dan/atau Wilayah Kerja

1. Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kelas I

NO	NOMENKLATUR UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh	Banda Aceh	Provinsi Aceh
2.	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara	Medan	Provinsi Sumatera Utara
3.	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Riau	Pekanbaru	Provinsi Riau
4.	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Riau	Tanjung Pinang	Provinsi Kepulauan Riau
5.	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat	Padang	Provinsi Sumatera Barat
6.	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Selatan	Palembang	Provinsi Sumatera Selatan
7.	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung	Bandar Lampung	Provinsi Lampung
8.	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Banten	Serang	Provinsi Banten
9.	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jakarta Metropolitan	Jakarta	Provinsi DKI Jakarta
10.	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Barat	Bandung	Provinsi Jawa Barat
11.	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah	Semarang	Provinsi Jawa Tengah
12.	Balai Prasarana Permukiman Wilayah D.I. Yogyakarta	Yogyakarta	Provinsi D.I. Yogyakarta
13.	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur	Surabaya	Provinsi Jawa Timur
14.	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali	Denpasar	Provinsi Bali
15.	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Barat	Mataram	Provinsi Nusa Tenggara Barat

NO	NOMENKLATUR UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA
16.	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Timur	Kupang	Provinsi Nusa Tenggara Timur
17.	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Barat	Pontianak	Provinsi Kalimantan Barat
18.	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan	Banjarmasin	Provinsi Kalimantan Selatan
19.	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Tengah	Palangkaraya	Provinsi Kalimantan Tengah
20.	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Timur	Samarinda	Provinsi Kalimantan Timur
21.	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Utara	Tanjung Selor	Provinsi Kalimantan Utara
22.	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara	Manado	Provinsi Sulawesi Utara
23.	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tenggara	Kendari	Provinsi Sulawesi Tenggara
24.	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tengah	Palu	Provinsi Sulawesi Tengah
25.	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Selatan	Makassar	Provinsi Sulawesi Selatan
26.	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua	Jayapura	Provinsi Papua
27.	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Barat	Manokwari	Provinsi Papua Barat

2. Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kelas II

NO	NOMENKLATUR UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bengkulu	Bengkulu	Provinsi Bengkulu
2.	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bangka Belitung	Pangkal Pinang	Provinsi Bangka Belitung
3.	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jambi	Jambi	Provinsi Jambi

4.	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo	Gorontalo	Provinsi Gorontalo
5.	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Barat	Mamuju	Provinsi Sulawesi Barat
6.	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Maluku	Ambon	Provinsi Maluku
7.	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Maluku Utara	Ternate	Provinsi Maluku Utara

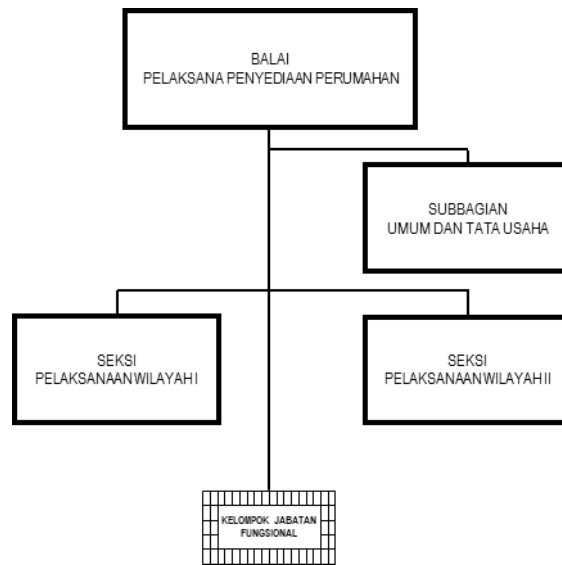
3. Balai Teknik

NO	NOMENKLATUR UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA
1	Balai Teknologi Air Minum	Bekasi	Seluruh Wilayah Indonesia
2	Balai Teknologi Sanitasi	Surabaya	Seluruh Wilayah Indonesia
3	Balai Bahan dan Struktur Bangunan Gedung	Kabupaten Bandung	Seluruh Wilayah Indonesia
4	Balai Sains Bangunan	Kabupaten Bandung	Seluruh Wilayah Indonesia
5	Balai Kawasan Permukiman dan Perumahan	Kabupaten Bandung	Seluruh Wilayah Indonesia

STRUKTUR ORGANISASI, NOMENKLATUR, LOKASI, DAN WILAYAH KERJABALAI
DI BAWAH KOORDINASI
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN

A. Struktur Organisasi

1. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan



B. Nomenklatur, Lokasi, dan/atau Wilayah Kerja

1. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kelas I

NO	NOMENKLATUR UPT	WILAYAH KERJA	PEMBAGIAN WILAYAH KERJA		LOKASI
			Wilayah I	Wilayah II	
1	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera II	Sumatera Utara	1. Kab. Batu Bara 2. Kab. Dairi 3. Kab. Deli Serdang 4. Kab. Humbang Hasudutan 5. Kab. Karo 6. Kab. Langkat 7. Kab. Nias Utara 8. Kab. Pakpak Barat 9. Kab. Samosir 10. Kab. Serdang Bedagai 11. Kab. Simalungun 12. Kota Gunung Sitoli 13. Kota Medan 14. Kota Binjai 15. Kota Pematang Siantar 16. Kota Tebing Tinggi	1. Kab. Asahan 2. Kab. Labuhan Batu 3. Kab. Labuhan Batu Selatan 4. Kab. Labuhan Batu Utara 5. Kab. Mandailing Natal 6. Kab. Nias 7. Kab. Nias Barat 8. Kab. Nias Selatan 9. Kab. Padang Lawas 10. Kab. Padang Lawas Utara 11. Kab. Tapanuli Selatan 12. Kab. Tapanuli Tengah 13. Kab. Tapanuli Utara 14. Kab. Toba	Medan

NO	NOMENKLATUR UPT	WILAYAH KERJA	PEMBAGIAN WILAYAH KERJA		LOKASI
			Wilayah I	Wilayah II	
				Samosir 15. Kota Padang Sidempuan 16. Kota Sibolga 17. Kota Tanjung Balai	
2	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III	Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau	Sumatera Barat	Riau dan Kepulauan Riau	Pekanbaru
3	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera IV	Bengkulu dan Jambi	Bengkulu	Jambi	Jambi
4	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V	Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan Lampung	Sumatera Selatang	Bangka Belitung dan Lampung	Palembang
5	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I	Banten dan DKI Jakarta	DKI Jakarta	Banten	Jakarta
6	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa II	Jawa Barat	1. Kota Bogor 2. Kab. Bogor 3. Kota Bekasi 4. Depok 5. Kab Sukabumi 6. Kota Sukabumi 7. Kab. Cianjur 8. Kab. Purwakarta	1. Kota Bandung 2. Kab. Bandung 3. Kab. Sumedang 4. Kab. Garut 5. Kab. Tasikmalaya 6. Kota Tasikmalaya	Bandung

NO	NOMENKLATUR UPT	WILAYAH KERJA	PEMBAGIAN WILAYAH KERJA		LOKASI
			Wilayah I	Wilayah II	
			9. Kab Bekasi 10. Kab. Subang 11. Kab. Karawang 12. Kota Cimahi 13. Kab. Bandung Barat	7. Kab. Ciamis 8. Kota Banjar 9. Kab. Pangandaran 10. Kab. Kuningan 11. Kota Cirebon 12. Kab. Cirebon 13. Kab. Majalengka 14. Kab. Indramayu	
7	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa III	Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta	Jawa Tengah	D.I.Yogyakarta	Yogyakarta
8	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa IV	Jawa Timur dan Bali	1. Kab. Bangkalan 2. Kab. Blitar 3. Kab. Bojonegoro 4. Kab. Gresik 5. Kab. Jombang 6. Kab. Kediri 7. Kab. Lamongan 8. Kab. Madiun 9. Kab. Magetan 10. Kab. Nganjuk 11. Kab. Ngawi 12. Kab. Pacitan	1. Kab. Banyuwang i 2. Kab. Bondowoso 3. Kab. Jember 4. Kab. Situbondo 5. Kab. Lumajang 6. Kab. Malang 7. Kab. Mojokerto 8. Kab. Pamekasan 9. Kab. Pasuruan 10. Kab.	Surabaya

NO	NOMENKLATUR UPT	WILAYAH KERJA	PEMBAGIAN WILAYAH KERJA		LOKASI
			Wilayah I	Wilayah II	
			13. Kab. Ponorogo 14. Kab. Sidoarjo 15. Kab. Sumenep 16. Kab. Trenggalek 17. Kab. Tuban 18. Kab. Temanggung 19. Kota Batu 20. Kota Blitar 21. Kota Kediri 22. Kota Madiun 23. Kota Surabaya	Probolinggo 11. Kab. Sampang 12. Kota Malang 13. Kota Pasuruan 14. Kota Probolinggo 15. Kab. Badung 16. Kab. Bangli 17. Kab. Buleleng 18. Kab. Gianyar 19. Kab. Jembrana 20. Kab. Karangasem 21. Kab. Klungkung 22. Kab. Tabanan 23. Kota Mojokerto 24. Kota Denpasar	
9	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I	Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah	Kalimantan Barat	Kalimantan Tengah	Pontianak
10	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II	Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan	Kalimantan Selatan	Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	Samarinda

NO	NOMENKLATUR UPT	WILAYAH KERJA	PEMBAGIAN WILAYAH KERJA		LOKASI
			Wilayah I	Wilayah II	
		Kalimantan Utara			
11	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi I	Sulawesi Utara dan Gorontalo	Sulawesi Utara	Gorontalo	Manado
12	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi II	Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat	Sulawesi Tengah	Sulawesi Barat	Palu
13	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi III	Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara	Sulawesi Selatan	Sulawesi Tenggara	Makassar
14	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Maluku	Maluku dan Maluku Utara	Maluku	Maluku Utara	Ambon
15	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua I	Papua	1. Kota Jayapura 2. Kab. Jayapura 3. Kab. Keerom 4. Kab. Sarmi 5. Kab. Biak Numfor 6. Kab. Supiori 7. Kab. Nabire 8. Kab. Kepulauan Yapen 9. Kab. Waropen 10. Kab. Mamberamo Raya 11. Kab.	1. Kab. Jayawijaya 2. Kab. Lanny Jaya 3. Kab. Pegunungan Bintang 4. Kab. Puncak Jaya 5. Kab. Puncak Jaya 6. Kab. Yalimo 7. Kab. Nduga 8. Kab. Tolikara 9. Kab. Boven Digoel 10. Kab. Mappi 11. Kab. Intan Jaya	Jayapura

NO	NOMENKLATUR UPT	WILAYAH KERJA	PEMBAGIAN WILAYAH KERJA		LOKASI
			Wilayah I	Wilayah II	
			Mamberamo Tengah 12. Kab. Mimika 13. Kab. Asmat 14. Kab. Merauke	12. Kab. Yahukimo 13. Kab. Dogiyai 14. Kab. Deiyai 15. Kab. Paniai	

2. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kelas II

No	NOMENKLATUR UPT	Wilayah Kerja	Pembagian Wilayah Kerja		LOKASI
			Wilayah I	Wilayah II	
1	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera I	Nanggroe Aceh Darussalam	1. Kabupaten Pidie 2. Kabupaten Pidie Jaya 3. Kabupaten Bireuen 4. Kota Lhokseumawe 5. Kota Langsa 6. Kabupaten Aceh Timur 7. Kabupaten Aceh Utara 8. Kabupaten Bener Meriah 9. Kabupaten Gayo Lues 10. Kabupaten Aceh Tenggara 11. Kabupaten Aceh Tengah	1. Kota Sabang 2. Kota Banda Aceh 3. Kabupaten Aceh Besar 4. Kabupaten Aceh Jaya 5. Kabupaten Aceh Barat 6. Kabupaten Aceh Barat Daya 7. Kabupaten Nagan Raya 8. Kabupaten Simeulue 9. Kota Subulussalam 10. Kabupaten Aceh Singkil 11. Kabupaten Aceh	Banda Aceh

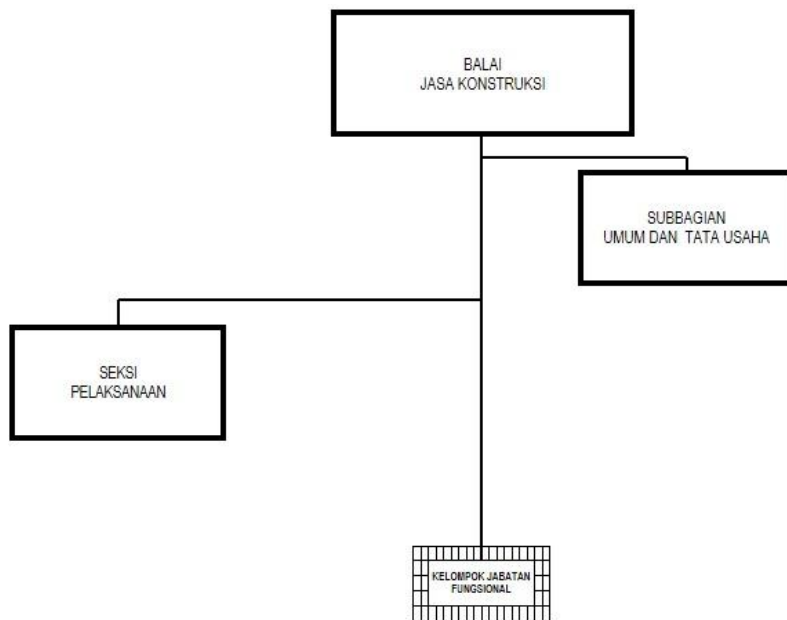
No	NOMENKLATUR UPT	Wilayah Kerja	Pembagian Wilayah Kerja		LOKASI
			Wilayah I	Wilayah II	
			12. Kabupaten Aceh Tamiang	Selatan.	
2	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I	Nusa Tenggara Barat	Pulau Lombok, terdiri dari: 1. Kota Mataram 2. Kabupaten Lombok Barat 3. Kabupaten Lombok Tengah 4. Kabupaten Lombok Timur 5. Kabupaten Lombok Utara	Pulau Sumbawa, terdiri dari: 1. Kabupaten Sumbawa Barat 2. Kabupaten Sumbawa 3. Kabupaten Dompu 4. Kabupaten Bima 5. Kota Bima	Mataram
3	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II	Nusa Tenggara Timur	1. Kota Kupang 2. Kab. Kupang 3. Kab TTS 4. Kab. TTU 5. Kab. Belu 6. Kab. Malaka 7. Kab. Alor 8. Kab. Sumba Timur 9. Kab. Sumba Tengah 10. Kab. Sumba Barat 11. Kab. Sumba Barat Daya	1. Kab. Lembata 2. Kab. Flores Timur 3. Kab. Sikka 4. Kab. Ende 5. Kab. Ngada 6. Kab Nagekeo 7. Kab. Manggarai Timur 8. Kab. Manggarai 9. Kab. Manggarai Barat 10. Kab. Rote Ndao 11. Kab. Sabu Raijua	Kupang

No	NOMENKLATUR UPT	Wilayah Kerja	Pembagian Wilayah Kerja		LOKASI
			Wilayah I	Wilayah II	
4	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II	Papua Barat	1. Kab. Manokwari 2. Kab. Manokwari Selatan 3. Kab. Pegunungan Arfak 4. Kab. Tambrau 5. Kab. Teluk Wobdama 6. Kab. Teluk Bintuni	1. Kab. Sorong 2. Kab. Sorong Selatan 3. Kota Sorong 4. Kab. Maybrat 5. Kab. Fakfak 6. Kab. Kaimana 7. Kab. Raja Ampat	Manokwari

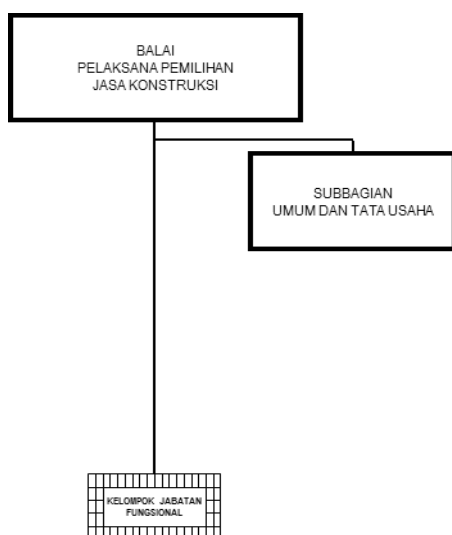
STRUKTUR ORGANISASI, NOMENKLATUR, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA BALAI
DI BAWAH KOORDINASI
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

A. Struktur Organisasi

1. Balai Jasa Konstruksi



2. Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi



B. Nomenklatur, Lokasi, dan/ atau Wilayah Kerja

1. Balai Jasa Konstruksi

NO	NOMENKLATUR UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Balai Jasa Konstruksi Wilayah I Aceh	Banda Aceh	1. Prov. Sumatera Utara 2. Prov. Nanggroe Aceh Darussalam 3. Prov. Riau 4. Prov. Kepulauan Riau 5. Prov. Sumatera Barat
2.	Balai Jasa Konstruksi Wilayah II Palembang	Palembang	1. Prov. Sumatera Selatan 2. Prov. Kep. Bangka Belitung 3. Prov. Jambi 4. Prov. Bengkulu 5. Prov. Lampung
3.	Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta	Jakarta	1. Prov. DKI Jakarta 2. Prov. Banten 3. Prov. Jawa Barat
4.	Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya	Surabaya	1. Prov. DI Yogyakarta 2. Prov. Jawa Tengah 3. Prov. Jawa Timur 4. Prov. Bali 5. Prov. Nusa Tenggara Barat 6. Prov. Nusa Tenggara Timur
5.	Balai Jasa Konstruksi Wilayah V Banjarmasin	Banjarmasin	1. Prov. Kalimantan Selatan 2. Prov. Kalimantan Timur 3. Prov. Kalimantan Tengah 4. Prov. Kalimantan Barat 5. Prov. Kalimantan Utara
6.	Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar	Makassar	1. Prov. Sulawesi Selatan 2. Prov. Sulawesi Utara 3. Prov. Sulawesi Barat 4. Prov. Sulawesi Tengah 5. Prov. Sulawesi Tenggara 6. Prov. Gorontalo
7.	Balai Jasa Konstruksi Wilayah VII Jayapura	Jayapura	1. Prov. Papua 2. Prov. Papua Barat 3. Prov. Maluku 4. Prov. Maluku Utara

2. Balai Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi Kelas I

NO	NOMENKLATUR UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Aceh	Banda Aceh	Prov. Aceh
2.	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Utara	Medan	Prov. Sumatera Utara
3.	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Barat	Padang	Prov. Sumatera Barat
4.	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Selatan	Palembang	Prov. Sumatera Selatan
5.	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jambi	Jambi	Prov. Jambi
6.	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Lampung	Bandar Lampung	Prov. Lampung
7.	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Banten	Serang	Prov. Banten
8.	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah DKI Jakarta	Jakarta	Prov. DKI Jakarta
9.	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Barat	Bandung	Prov. Jawa Barat
10.	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah D.I. Yogyakarta	Yogyakarta	Prov. D.I. Yogyakarta
11.	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Tengah	Semarang	Prov. Jawa Tengah
12.	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Timur	Surabaya	Prov. Jawa Timur
13.	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Bali	Denpasar	Prov. Bali
14.	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Nusa Tenggara Timur	Kupang	Prov. Nusa Tenggara Timur
15.	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Nusa Tenggara Barat	Mataram	Prov. Nusa Tenggara Barat

NO	NOMENKLATUR UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA
16.	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Barat	Pontianak	Prov. Kalimantan Barat
17.	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Selatan	Banjarmasin	Prov. Kalimantan Selatan
18.	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Tengah	Palangkaraya	Prov. Kalimantan Tengah
19.	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Timur	Samarinda	Prov. Kalimantan Timur
20.	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Utara	Tarakan	Prov. Kalimantan Utara
21.	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Utara	Manado	Prov. Sulawesi Utara
22.	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Tenggara	Kendari	Prov. Sulawesi Tenggara
23.	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Tengah	Palu	Prov. Sulawesi Tengah
24.	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Selatan	Makassar	Prov. Sulawesi Selatan
25.	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Papua	Jayapura	Prov. Papua
26.	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Papua Barat	Manokwari	Prov. Papua Barat

3. Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Kelas II

NO	Nomenklatur UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Riau	Pekanbaru	Prov. Riau
2.	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kepulauan Riau	Batam	Prov. Kepulauan Riau

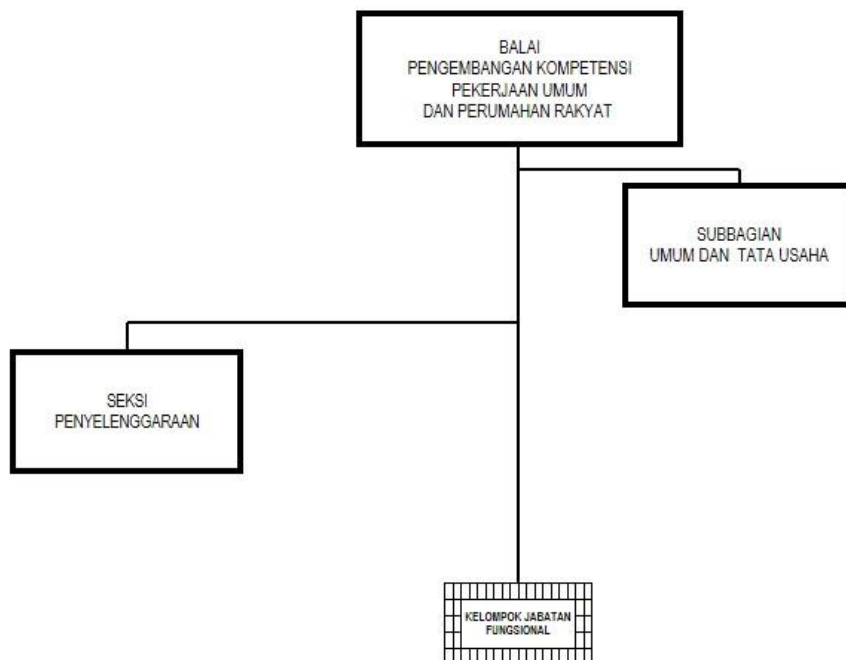
NO	Nomenklatur UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA
3.	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Bengkulu	Bengkulu	Prov. Bengkulu
4.	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Bangka Belitung	Pangkal Pinang	Prov. Bangka Belitung
5.	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Gorontalo	Gorontalo	Prov. Gorontalo
6.	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Barat	Mamuju	Prov. Sulawesi Barat
7.	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Maluku	Ambon	Prov. Maluku
8.	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Maluku Utara	Ternate	Prov. Maluku Utara

STRUKTUR ORGANISASI, NOMENKLATUR, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA BALAI
DI BAWAH KOORDINASI

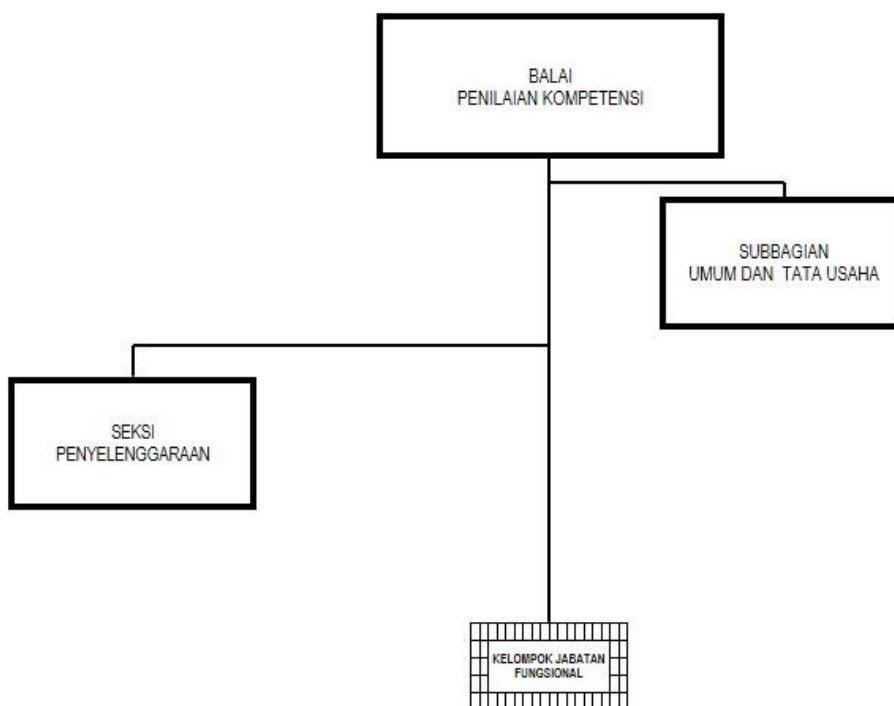
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

A. Struktur Organisasi

1. Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



2. Balai Penilaian Kompetensi



B. Nomenklatur, Lokasi, dan/ atau Wilayah Kerja

1. Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

NO	NOMENKLATUR UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah I Medan	Medan	1. Prov. Sumatera Utara 2. Prov. Aceh 3. Prov. Riau 4. Prov. Kepulauan Riau 5. Prov. Sumatera Barat
2.	Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah II Palembang	Palembang	1. Prov. Sumatera Selatan 2. Prov. Kep. Bangka Belitung 3. Prov. Jambi 4. Prov. Bengkulu 5. Prov. Lampung
3.	Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah III Jakarta	Jakarta	1. Prov. DKI Jakarta 2. Kota Bogor 3. Kota Depok 4. Kota Bekasi 5. Kota Tangerang 6. Kota Tangerang Selatan
4.	Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah IV Bandung	Bandung	1. Prov. Jawa Barat (selain Kota Bogor, Kota Depok, Kota dan Kabupaten Bekasi) 2. Prov. Banten (selain Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan)
5.	Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah V Yogyakarta	Yogyakarta	1. Prov. DI Yogyakarta 2. Prov. Jawa Tengah 3. Kabupaten Ponorogo 4. Kabupaten Pacitan
6.	Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan	Surabaya	1. Prov. Jawa Timur (selain Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Pacitan)

NO	NOMENKLATUR UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA
	Perumahan Rakyat Wilayah VI Surabaya		2. Prov. Bali 3. Prov. Nusa Tenggara Barat 4. Prov. Nusa Tenggara Timur
7.	Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah VII Banjarmasin	Banjarmasin	1. Prov. Kalimantan Selatan 2. Prov. Kalimantan Timur 3. Prov. Kalimantan Tengah 4. Prov. Kalimantan Barat 5. Prov. Kalimantan Utara
8.	Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah VIII Makassar	Makassar	1. Prov. Sulawesi Selatan 2. Prov. Sulawesi Utara 3. Prov. Sulawesi Barat 4. Prov. Sulawesi Tengah 5. Prov. Sulawesi Tenggara 6. Prov. Gorontalo 7. Prov. Maluku Utara
9.	Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah IX Jayapura	Jayapura	1. Prov. Papua 2. Prov. Papua Barat 3. Prov. Maluku

2. Balai Penilaian Kompetensi

NO	NOMENKLATUR UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Balai Penilaian Kompetensi	Jakarta	Seluruh Wilayah Indonesia

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT

Kepala Biro Hukum,



Putranta Setyanugraha, SH. MSi.

NIP. 196212251993011001

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIKINDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO